

FORMULIR 2 :
RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN : 2015

A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
B. UNIT ORGANISASI	: (12) BADAN KEBIJAKAN FISKAL
C. MISI UNIT ORGANISASI	: Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan.
D. SASARAN STRATEGIS	: 01 Tingkat pendapatan yang optimal 02 Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal 03 Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi 04 Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel 05 Tata kelola yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara. 06 Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah 07 Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 08 Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien. 09 Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel. 10 Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal. 11 Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid. 12 Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara. 13 Optimalisasi pengelolaan kas. 14 Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya. 15 Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU. 16 Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 17 Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu. 18 Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal 19 Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel

	<p>20 Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use</p> <p>21 Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara</p> <p>22 Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel</p> <p>23 Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional</p> <p>24 Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif.</p> <p>25 Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal.</p> <p>26 Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, resilience dan liquid.</p> <p>27 Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (fairness and transparency).</p> <p>28 Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional.</p> <p>29 Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompentensi tinggi</p> <p>30 Terwujudnya organisasi yang handal dan modern</p> <p>31 Terwujudnya good governance</p> <p>32 Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi</p> <p>33 Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan</p>
--	---

E. PROGRAM : (015.12.11) Program Perumusan Kebijakan Fiskal

F. HASIL (OUTCOME) : Terwujudnya Kebijakan Fiskal yang Sustainable Dengan Beban Risiko Fiskal yang Terukur Dalam Rangka Stabilisasi dan Mendorong Pertumbuhan Perekonomian

G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM : 01 Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan
 02 Deviasi proyeksi indikator kebijakan fiskal
 03 Persentase usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional

H. RINCIAN PROGRAM

KODE	I. KEGIATAN/ESELON II / FUNGSI / SUB FUNGSI / PRIORITAS / FOKUS PRIORITAS II. OUTPUT (VOL SAT)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ ANGKA DASAR/INISIATIF BARU	ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1740	Perumusan Kebijakan APBN	0	7.817.234	5.070.137	5.203.552	5.343.271
	Eselon II					
	PKAPBN					
	Fungsi					

	PELAYANAN UMUM					
	Sub Fungsi					
	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI					
	Prioritas Nasional					
	-					
	Output					
	Laporan Rekomendasi kebijakan Potensi Penerimaan Negara	0	2.354.888	2.468.148	2.586.875	2.711.335
	Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Belanja Pusat	0	3.447.810	1.056.525	1.066.518	1.076.900
	Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transfer ke Daerah	0	989.126	517.173	518.873	520.639
	Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Subsidi	0	1.025.410	1.028.291	1.031.286	1.034.397
	Indikator Kinerja Kegiatan					
	00 Persentase rekomendasi kebijakan APBN yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan					
	00 Deviasi proyeksi indikator kebijakan APBN					
1741	Perumusan Kebijakan Ekonomi	0	13.544.488	12.551.597	13.141.513	13.759.352
	Eselon II					
	PKEM					
	Fungsi					
	PELAYANAN UMUM					
	Sub Fungsi					
	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI					
	Prioritas Nasional					
	-					
	Output					
	Laporan pemantauan dini perkembangan ekonomi makro	0	864.461	903.751	944.847	987.833
	Laporan hasil penelitian perguruan tinggi	0	498.100	522.312	547.703	574.332
	Hasil penilaian peneliti	0	128.080	134.271	140.764	147.570
	Jurnal ekonomi dan keuangan negara	0	306.410	319.684	333.540	348.004
	Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Analisis Fiskal	0	1.703.460	1.779.367	1.858.700	1.941.615

	Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Analisis Sektor Riil	0	5.895.207	6.177.458	6.473.284	6.783.336
	Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Analisis Moneter dan Lembaga Keuangan	0	4.148.770	2.714.754	2.842.675	2.976.662
	Indikator Kinerja Kegiatan					
	00 Persentase rekomendasi kebijakan ekonomi makro yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan					
	00 Deviasi proyeksi indikator kebijakan ekonomi makro					
1742	Perumusan Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral	0	14.282.517	6.304.101	5.858.717	6.937.039
	Eselon II					
	Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral					
	Fungsi					
	PELAYANAN UMUM					
	Sub Fungsi					
	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI					
	Prioritas Nasional					
	-					
	Output					
	Laporan rekomendasi kebijakan di bidang pembiayaan perubahan iklim	0	1.370.925	3.595.250	3.017.133	3.956.217
	Laporan rekomendasi kebijakan bidang forum G-20 dan multilateral	0	12.911.592	2.708.851	2.841.584	2.980.822
	Indikator Kinerja Kegiatan					
	00 Persentase rekomendasi kebijakan pembiayaan perubahan iklim dan multilateral yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan					
	00 Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional					
1743	Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNB	0	9.150.249	10.701.129	11.215.044	11.753.734
	Eselon II					
	PKPN					
	Fungsi					
	PELAYANAN UMUM					
	Sub Fungsi					
	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI					

	Prioritas Nasional					
	-					
	Output					
	Laporan rekomendasi kebijakan di bidang pajak	0	4.575.110	4.794.265	5.023.964	5.264.714
	Laporan rekomendasi kebijakan di bidang kepabeanan, cukai dan PNBPN	0	4.575.139	5.906.864	6.191.080	6.489.020
	Indikator Kinerja Kegiatan					
	00 Persentase rekomendasi kebijakan pendapatan negara yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan					
1744	Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan	0	8.460.600	5.163.020	5.364.556	5.575.874
	Eselon II					
	PPRF					
	Fungsi					
	PELAYANAN UMUM					
	Sub Fungsi					
	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI					
	Prioritas Nasional					
	-					
	Output					
	Laporan rekomendasi kebijakan pengelolaan risiko fiskal	0	6.460.700	4.163.070	4.364.606	4.575.924
	Laporan rekomendasi kebijakan di bidang peraturan pengelolaan risiko fiskal	0	1.999.900	999.950	999.950	999.950
	Indikator Kinerja Kegiatan					
	00 Persentase rekomendasi kebijakan pengelolaan risiko fiskal yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan					
	00 Jumlah rekomendasi kebijakan dalam rangka mitigasi risiko fiskal					
1745	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Kebijakan Fiskal	0	77.431.479	68.966.873	70.919.940	73.088.360
	Eselon II					
	Sekretariat BKF					
	Fungsi					
	PELAYANAN UMUM					

	Sub Fungsi					
	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI					
	Prioritas Nasional					
	-					
	Output					
	Layanan perkantoran	0	5.980.815	6.248.772	6.528.880	6.821.699
	Layanan TIK, data dan informasi	0	2.139.000	2.240.040	2.209.047	2.313.524
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	0	1.787.630	1.875.223	1.967.109	2.063.497
	Dokumen perencanaan dan keuangan	0	2.368.920	1.863.746	1.955.070	2.050.867
	Dokumen organisasi dan kepegawaian	0	2.988.813	3.135.263	3.288.891	3.450.047
	Gedung / Bangunan	0	8.498.267	0	0	0
	Layanan Perkantoran	0	46.992.934	48.069.641	49.184.033	50.337.429
	Kendaraan Bermotor	0	3.228.710	0	0	0
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	1.776.000	1.845.264	1.917.229	1.992.001
	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	0	1.670.390	3.688.924	3.869.681	4.059.296
	Indikator Kinerja Kegiatan					
	00 Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja					
	00 Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat					
	00 Tingkat Kepuasan Layanan Kesekretariatan					
5135	Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Regional dan Bilateral	0	11.285.775	7.163.940	7.505.681	7.532.326
	Eselon II					
	Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral					
	Fungsi					
	PELAYANAN UMUM					
	Sub Fungsi					
	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI					
	Prioritas Nasional					
	-					

Output						
Laporan analisis bidang interregional	0	4.194.763	194.407	201.989	209.866	
Laporan analisis bidang ASEAN	0	362.159	224.210	225.159	226.145	
Laporan analisis bidang bilateral	0	708.809	711.796	1.030.997	1.034.223	
Laporan analisis bidang evaluasi kebijakan regional dan bilateral	0	6.020.044	6.033.527	6.047.536	6.062.092	
Indikator Kinerja Kegiatan						
00 Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan regional dan bilateral						
JUMLAH	0	141.972.342	115.920.797	119.209.003	123.989.956	

I. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI

KODE	FUNGSI / SUB FUNGSI	ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
01	PELAYANAN UMUM	0	141.972.342	115.920.797	119.209.003	123.989.956
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	0	141.972.342	115.920.797	119.209.003	123.989.956
	JUMLAH	0	141.972.342	115.920.797	119.209.003	123.989.956

K. BIAYA PROGRAM

BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA	(DALAM RIBUAN RUPIAH)				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1. KELOMPOK BIAYA					
a. Operasional	0	46.992.934	48.069.641	49.184.033	50.337.429
b. Non Operasional	0	94.979.408	67.851.156	70.024.970	73.652.527
2. JENIS BELANJA					
a. Belanja Pegawai	0	30.763.069	0	0	0
b. Belanja Barang	0	95.675.906	0	0	0
c. Belanja Modal	0	15.533.367	0	0	0
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	0	0	0	0	0
e. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0

f. Belanja Hibah	0	0	0	0	0
g. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0
3. SUMBER DANA					
a. Rupiah Murni	0	141.972.342	0	0	0
b. Pinjaman Luar Negeri (PLN)	0	0	0	0	0
c. Rupiah Murni Pendamping	0	0	0	0	0
d. PNBP	0	0	0	0	0
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)	0	0	0	0	0
f. Badan Layanan Umum (BLU)	0	0	0	0	0
g. Stimulus	0	0	0	0	0
h. Hibah Dalam Negeri (HDN)	0	0	0	0	0
i. Hibah Luar Negeri	0	0	0	0	0
j. SBSN PBS	0	0	0	0	0

L. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL :

M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN

KODE	KEGIATAN	URAIAN PENDAPATAN	(DALAM RIBUAN RUPIAH)				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		a. Perpajakan	0	0	0	0	0
		b. PNBP	0	0	0	0	0
	JUMLAH	a. Perpajakan	0	0	0	0	0
		b. PNBP	0	0	0	0	0